

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Refleksi 24 Tahun Reformasi dan Kebebasan Sipil di Indonesia

Pemateri :

1. **Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute**
2. **Ubedilah Badrun, Aktivis 1998 dan Akademisi Universitas Negeri Jakarta**
3. **Ika Ningtyas, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen**

Moderator : Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute

- Terdapat 7 tuntutan Reformasi 1998, yaitu amandemen UUD, pemberantasan KKN, pencabutan Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan HAM dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi daerah
- Data World Bank tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan kebebasan sipil di Indonesia
- Penilaian dari Freedom House tahun 2018-2020 juga menunjukkan penurunan kebebasan sipil di Indonesia
- Salah satu permasalahan dalam kebebasan sipil di Indonesia adalah adanya UU ITE. Laporan SAFEnet tahun 2008 – 2020 menunjukkan adanya 324 kasus terkait UU ITE
- Data LBH Pers juga menunjukkan terdapat 10 jurnalis dihukum melalui UU ITE selama tahun 2020
- Persoalan UU ITE dari aspek konten meliputi kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat untuk kelompok sasaran, lokasi pengambilan keputusan, penerapan program kebijakan dan sumber daya yang dikerahkan
- Persoalan UU ITE dari aspek konteks seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa, dan tingkat kepatuhan
- Terdapat beberapa kasus terkait UU ITE dalam hal kritik warga terhadap pemerintah, seperti kasus Ravigo Patra, Kasus Faisol Abod Batis, kasus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kasus Mohammad Hisbun Payu, dan peretasan akun media sosial aktivis anti korupsi

- Rekomendasi kebijakan dalam aspek hukum seperti memperjelas perbedaan antara ekspresi dan pelanggaran hukum, mengupayakan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menangani persoalan pasal multitafsir dalam UU ITE, UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awal dan mengembalikan beberapa ketentuan yang memuat sanksi pidana di dalam UU ITE ke KUHP
- Rekomendasi kebijakan dalam aspek literasi digital seperti program yang lebih inklusif kepada lembaga negara, publik dan juga sektor swasta

Ubedilah Badrun, Aktivistis 1998 dan Akademisi Universitas Negeri Jakarta

- Salah satu poin penting dalam tuntutan reformasi tahun 1998 adalah penegakan HAM dan demokrasi. Cita-cita dari adanya demokrasi yang sehat adalah adanya kebebasan sipil
- Pada masa orde baru, ada perasaan takut. Pada saat reformasi, kita sudah mulai berani untuk berekspresi. Namun saat ini seperti pada tahun 1994, saat orde baru.
- Saat ini dapat dikatakan seperti “neo-otoritarianisme” karena menggunakan instrumen baru yaitu teknologi dan digital
- Yang menjadi problem kebebasan sipil saat ini adalah nihilnya paradigm kebebasan sipil dari elit politik saat ini
- Problem lainnya adalah regulasi yang membuka peluang untuk membatasi kebebasan sipil
- Problem kebebasan sipil juga ada di aktor non-negara, misalnya terkait *buzzer*.

Ika Ningtas, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen

- Saat ini sudah ada beberapa produk hukum untuk melindungi kebebasan pers, seperti UU Pers tahun 1999, MOU Dewan Pers dengan Kapolri, MOU Dewan Pers dengan TNI, serta MOU Dewan Pers dengan Kejaksaan
- Sejak tahun 2008 hingga 2022, terdapat 911 kasus kekerasan terhadap jurnalis
- Jika dilihat, angka kekerasan paling tinggi terletak di tahun 2020
- Tantangan yang dihadapi oleh jurnalis saat ini seperti kriminalisasi, kekerasan, *internet shutdown*, dan serangan digital
- UU ITE juga dapat menjadi persoalan bagi jurnalis, sebagai contoh kasus Muhammad Asrul yang dituntut 1 tahun penjara karena berita dugaan korupsi
- Selain itu, ada pula kasus jurnalis *zonasultra.com* yang dianiaya saat meliput aksi demonstrasi
- Akun peretasan juga menjadi persoalan, misalnya kasus peretasan akun Youtube suara kita
- *Internet Shutdown* seperti pemblokiran suarapapua juga menjadi salah satu persoalan

- Terdapat empat rekomendasi, yaitu revisi UU ITE, membuka akses jurnalis asing ke Papua, dukungan dari CSO dan publik, serta penegakan hukum.

FORUM DISKUSI

1. Prasetyo Putra Nugraha: apa yang membedakan gerakan mahasiswa saat ini dengan pada masa orde baru dan reformasi?

Jawaban:

- Terdapat sejumlah tantangan dari gerakan mahasiswa saat ini, misalnya ada sanksi dari kampus. Selain itu, adanya penurunan militansi karena lemahnya proses kaderisasi (**Arfianto Purbolaksono**)

2. Adinda Tenrianke Muchtar: apa catatan terkait SKB Implementasi UU ITE? Apakah SKB tersebut bermanfaat?

Jawaban:

- SKB belum efektif karena masih ada multitafsir. Represi juga masih terjadi setelah adanya SKB (**Ubedilah Badrun**)
- Pasal multitafsir bisa digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Tidak ada jalan lain selain merevisi UU ITE (**Ika Ningtyas**)

3. Afida R: Bagaimana peran OMS dalam mendorong dan mengawal revisi UU ITE?

Jawaban:

- Teman-teman AJI dan OMS terus mendorong revisi UU ITE. Banyak hal yang dilakukan untuk meningkatkan perhatian publik, misalnya seperti membuat diskusi. Kami juga telah membuat daftar inventaris masalah. Saat ini revisi UU ITE sudah masuk ke prolegnas (**Ika Ningtyas**)

Closing Statement

1. Ika Ningtyas

Kondisi kebebasan pers akan memburuk jika tidak ada dukungan dari publik. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama mengawal, mengkritik, dan mengoreksi segala kebijakan yang melanggar kebebasan manusia

2. Ubedilah Badrun

Reformasi yang sudah 24 tahun, mungkin banyak harapan yang kita inginkan. Namun, yang perlu untuk kita renungkan hari ini, dapat dikatakan 70 persen agenda reformasi dianggap gagal, terutama soal kebebasan sipil. Oleh karena itu, kebebasan perlu untuk terus diperjuangkan.

3. Arfianto Purbolaksono

Ini bentuk ikhtiar kita bersama untuk memperbaiki kebebasan. Untuk itu, diperlukan koalisi besar, koalisi rakyat, koalisi bersama untuk memperjuangkan kebebasan.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

~ TERIMA KASIH ~